

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Tujuan Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Nasional juga diharapkan mampu menumbuhkan dan memperdalam cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dikembangkan situasi belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsanya.

Peran serta dukungan dari masyarakat dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan. Bentuk dukungan dari masyarakat tidak hanya dalam bentuk keuangan, tapi orang tua dari wali murid diharapkan dapat berperan serta dalam mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dalam sekolah. Masyarakat diharapkan tidak hanya sekedar menyekolahkan putra-putri mereka namun dapat berperan serta dalam upaya pengawasan dan sekaligus dapat sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan program-program sekolah.

Sebagai lembaga pendidikan sekolah harus mampu menjembatani masyarakat agar mampu dan dapat bekerja sama dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan sistem pendidikan terutama yang terkait dengan penerapan manajemen supaya lebih tepat dan efektif. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun demikian indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.

Partisipasi orang tua selama ini hanyalah sebagai penyandang dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti dalam pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, sehingga sekolah seolah tidak mempunyai beban dan tanggung jawab hasil pendidikan kepada masyarakat dan orang tua. Disinilah terlihat bahwa peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diperlukan, dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat (Hasbullah, 2007;hal 4). Dalam kondisi seperti ini sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah dan berupaya menawarkan partisipasi langsung kepada berbagai pihak terkait. Sehingga peranan masyarakat sangat diperlukan dan menjadi suatu kewajiban.

Pendidikan merupakan suatu proses dimana melibatkan interaksi antara berbagai input dan penelitian, karena interaksi dan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, maka keseragaman secara menyeluruh yang di instruksikan dari pusat tidak akan pernah menghasilkan proses pendidikan yang maksimal. Dengan kata lain kebijakan desentralisasi akan dapat mengoptimalkan proses pendidikan yang berkualitas. Dengan desentralisasi berarti pemegang kendali pendidikan di tingkat bawah akan mempunyai peranan yang lebih besar. Keadaan ini akan mendorong kreativitas dan improvisasi dalam melaksanakan pendidikan (Mahfud Junaidi, 2001:16).

Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perkembangan abad 21, yang di kenal dengan era globalisasi. Dalam bidang pendidikan, Indonesia dewasa ini paling sedikit menghadapi tiga persoalan yang serius. *Pertama*, krisis moral yang begitu dahsyat di dalam masyarakat. *Kedua*, sistem pembelajaran yang belum begitu memadai di sekolah-sekolah. *Ketiga*, mutu pendidikan yang masih rendah khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah (Sindhunata, 2001:1).

Desentralisasi pendidikan berdasarkan otonomi sekolah, akan mampu mengurangi atau meghilangkan sikap diskriminatif pemerintah terhadap sekolah-sekolah negeri dan swasta, oleh karena itu jika perlu status negeri yang selama ini melekat pada lembaga-lembaga pendidikan pada pemerintah dihapuskan sehingga dapat mengurangi intervensi pemerintah terhadap sekolah secara berlebihan.

Desentralisasi pendidikan juga dapat meningkatkan pemerataan kemajuan dalam dunia pendidikan.

Jika lembaga-lembaga pendidikan diberikan kewenangan yang lebih luas, maka diharapkan mereka akan dapat bersaing dengan sehat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun demikian bukan berarti pemerintah lepas tangan dari tanggung jawab dalam dunia pendidikan, melainkan tetap bertanggung jawab sebagai fasilitator, mediator dan yang terpenting yaitu sebagai penyangga dana dalam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Eksistensi MBS disekolah menjadikan peran kepala sekolah sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan dan output nya. Menurut Sudarwan Danim, kepala sekolah mempunyai multi peran, yaitu: sebagai *administrator, manager, leader, motivator, negotiator, figure, communicator*, wakil lembaga dalam urusan eksternal dan fungsi-fungsi yang lainnya (Sudarwan Danim, 2005: 55)

Menurut UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyatakan pengadaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah didasarkan pada standart pelayanan minimum dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah. Dalam manajemen berbasis sekolah dimana memberikan keluasaan kepada sekolah untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan melibatkan semua unsur stakeholder untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah tersebut. Sementara pada pasal 9 UU No. 20 Tahun

2003 juga ditegaskan, bahwa: masyarakat berkewajiban memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah konsep yang menggambarkan perubahan formal struktur penyelenggaraan sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat di dorong dan di potong (Mulyasa, 2006:10)

Kepala sekolah adalah seorang tenaga professional atau guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana sekolah menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi pelajaran, siswa yang menerima pelajaran, orang tua sebagai harapan, pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum sebagai kebanggaan. (Ibrahim Bafadal, 2012: 62).

Saat ini banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang kualitas pendidikannya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berstatus negeri. SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar adalah salah satu dari sekian banyak sekolah yang masih mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada di kabupaten karanganyar. Eksistensi yang di jaga selama ini juga tidak lepas dari peranan kepala sekolah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.

Kepala sekolah mempunyai strategi tersendiri dalam menjaga eksistensi SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar, yang tentunya juga di bantu

oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada sekolah tersebut. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala sekolah juga mengalami hambatan, baik dari faktor intern dan juga faktor ekstern. Melihat begitu pentingnya dalam mengembangkan suatu lembaga pendidikan dalam mengatur diri secara mandiri dengan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Pada kenyataanya saat ini partisipasi masyarakat lebih berupa dukungan pendanaan semata, masyarakat cenderung kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, sehingga sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil pendidikan kepada masyarakat. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Muhammadiyah Darul Arqom belum sepenuhnya melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah dan masyarakat luas pada umumnya, padahal agar tercipta suasana pendidikan yang harmonis masyarakat dan juga orang tua siswa harus dilibatkan, sehingga perlu adanya pemberdayaan agar keterlibatan mereka tidak sekedar terlibat saja tetapi juga dapat mengoptimalkan peningkatan pendidikan dalam rangka penerapan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan realita tersebut sebenarnya sekolah membutuhkan banyak sekali masukan dan ide-ide dari masyarakat dalam rangka merumuskan dan mencapai program-program yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Disisi yang lain masyarakat sebenarnya juga membutuhkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi putra-putrinya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pemberdayaan Masyarakat

dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.
2. Bagaimana kontribusi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Akademis (input, proses dan output) Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.
3. Bagaimanakah model Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.
2. Untuk mendeskripsikan kontribusi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Akademis (input, proses dan output) Sekolah

Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.

3. Untuk mendeskripsikan model Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian yang mendalam dan mengembangkan konsep atau teori yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas sekolah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah.
- b. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama antara guru dengan komite sekolah dalam mewujudkan kwalitas pendidikan. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dunia pendidikan khususnya dalam peningkatan kualitas sekolah.
- c. Bagi orang tua peserta didik, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan peran sertanya dalam meningkatkan kualitas sekolah.